



# RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
SINTANG



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan M. Saad Sintang Sintang Kalimantan Barat 78611

Telp. (0565) -2022933 Fax. (0565) -2022931

e-mail : diskominfo@sintang.go.id

---

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANGTAHUN**  
**2016-2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tentang Rencana Strategis DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang – Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;

21. Peraturan Menteri ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah;
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : (1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang selaku perangkat Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Renstra Diskominfo Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RENSTRA Diskominfo Kabupaten Sintang ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : (1) Renstra Diskominfo Kabupaten Sintang ini memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021.
  - b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Sintang periode 2016-2021.
  - c. Rencana Program ...

- c. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021 .
- d. Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Kepala beserta seluruh staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Dalam hal substansi Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA Diskominfo Kabupaten Sintang.

KELIMA : (1) Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.  
(2) Resntra Diskominfo Kabupaten Sintang ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal                      Maret 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sintang



**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740323 199803 1 005





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang beserta jajarannya untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang komunikasi dan informatika, dan *Sustainable Development* (SD) atau Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan sektor lain yang terkait untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju,  
Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Dan Bersih pada Tahun 2021”**

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan Rencana strategis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Renstra dimasa yang akan datang.

Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang, dan terima kasih.

Sintang, 2020  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sintang

**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740323 199803 1 005

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI .....   | ii  |
| DAFTAR TABEL .....   | iii |
| <br>   |     |
| BAB I .....  | 1   |
| PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 5   |
| <br>   |     |
| BAB II .....   | 7   |
| GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG ..           | 7   |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                              | 7   |
| 2.2 Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Sintang .....                                 | 18  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang .....                           | 20  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....                             | 37  |
| <br>   |     |
| BAB III .....  | 39  |
| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN                |     |
| INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG .....  | 39  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....         | 39  |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....    | 39  |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan |     |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar .....                             | 41  |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 44  |
| <br>   |     |
| BAB IV .....   | 46  |
| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANDINAS KOMUNIKASI DAN         |     |
| INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG .....  | 46  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo .....                            | 46  |
| <br>   |     |
| BAB V .....  | 48  |
| STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....  | 48  |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan Diskominfo .....  | 48  |
| <br>   |     |
| BAB VI .....   | 50  |
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN              |     |
| PENDANAAN INDIKATIF .....  | 50  |
| <br>   |     |
| BAB VII .....  | 53  |
| KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....  | 53  |
| <br>   |     |
| BAB VIII .....   | 55  |
| PENUTUP .....  | 55  |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 2.1</b> Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2021).....  | 18 |
| <b>Tabel 2.2</b> Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....  | 18 |
| <b>Tabel 2.3</b> Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang .....  | 18 |
| <b>Tabel 2.4</b> Jumlah Sarana dan Prasarana (Per 2021).....   | 19 |
| <b>Tabel 2.5</b> Anggaran Pelayanan (Belanja Langsung) Diskominfo .....  | 20 |
| <b>Tabel 2.6</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang .....   | 21 |
| <b>Tabel 2.7</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.....  | 22 |
| <b>Tabel 3.1</b> Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....  | 40 |
| <b>Tabel 3.2</b> Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....              | 42 |
| <b>Tabel 3.3</b> Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kalbar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... | 43 |
| <b>Tabel 4.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 .....   | 46 |
| <b>Tabel 5.1</b> Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....  | 48 |
| <b>Tabel 6.1</b> Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.....                   | 51 |
| <b>Tabel 7.1</b> Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....   | 53 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Sintang. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD. Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
13. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
32. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
36. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.
41. Peraturan (Daerah) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
45. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
47. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
49. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. .

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Diskominfo Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan beserta staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Diskominfo Kabupaten Sintang dengan OPD dan instansi lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG**

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan,



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Diskominfo Kabupaten Sintang.

- BAB III** ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG  
Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV** VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.
- BAB V** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- BAB VI** INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.
- BAB VII** PENUTUP  
Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

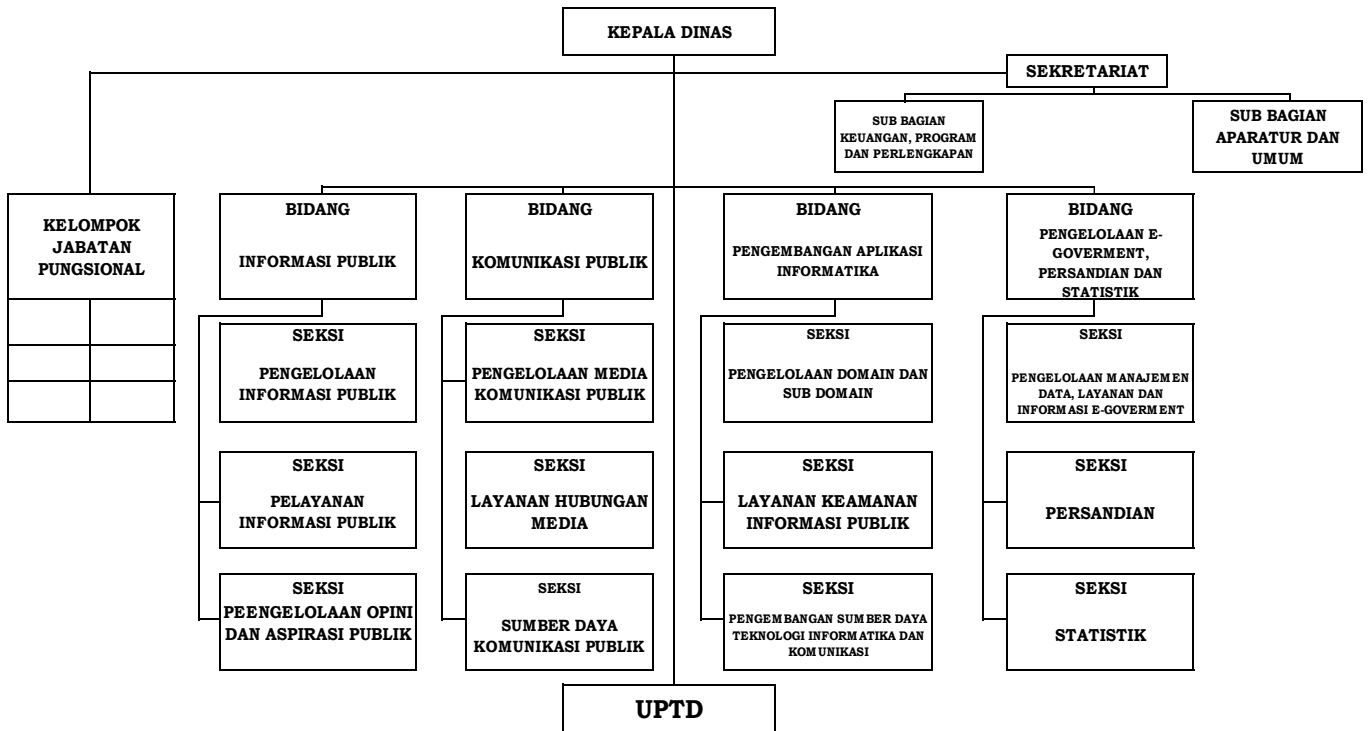
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya. Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
- g. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2020  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi;

- a. pemimpin dan pengoordinasian kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika dan Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik;
- b. penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika;

- d. perumusan penjabaran kebijakan dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
  - e. pemberian pertimbangan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - f. pembinaan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
  - i. penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati;
  - j. penetapan kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
  - l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - m. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf; dan
  - o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip dan penyusunan rencana kegiatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - c. Penghimpunan peraturan , ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. Penghimpunan, penyusunan dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
  - g. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
  - h. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada

para kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terbagi atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja Dinas, perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- d. Pembuatan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pendukung kegiatan pada Dinas komunikasi dan Informatika.;
- e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.;
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas;
- i. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Pelaksanaan penatausahaan aset dinas Komunikasi dan Informasi;
- l. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;

- n. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun; dan
  - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Aparatur dan Umum, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas fungsi:
- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan umum;
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh Kepala Dinas;
  - c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
  - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturanperundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai;
  - f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas;
  - g. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - i. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang- undang yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan dan fungsinya.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - c. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - d. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian data dan Informasi Pembangunan.  
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
  - b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
  - c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
  - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, an kriteria di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
  - e. Pelaksanaan pengolahan, perekaman, pengendalian dan pendistribusian data dan bahan melalui perangkat elektronik serta menyajikan data dan informasi pembangunan dalam bentuk laporan / buku maupun media visual termasuk menampilkan data dalam bentuk situs internet;
  - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perencanaan teknis operasional pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan media Komunikasi dan penyediaan konten.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
  - b. Pelaksanaan Program kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
  - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
  - d. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
  - e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
  - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan perencanaan teknis operasional, melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
  - b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
  - c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
  - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan nomra, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
  - e. Penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan program kegiatan dibidang pelayanan dan pendayagunaan media publik, media komunikasi kelompok dan media komunikasi tradisional;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media;
  - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
  - h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
  - b. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Aplikasi informatika;
  - d. penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
  - f. penghimpunaan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta



- arahan kepada seksi-seksi di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan fasilitasi dan pembinaan terhadap penggunaan Domain dan Sub Domain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
  - b. pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
  - c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
  - e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keamanan Informasi Publik.  
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik;
    - b. pelaksanaan Program Kerja Seksi layanan Keamanan Informasi Publik;
    - c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Layanan Keamanan Informasi Publik;
    - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Layanan Keamanan Informasi Publik;
    - e. penyiapan bahan pemberian ijin/rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin di bidang telekomunikasi dan informatika meliputi pembangunan media, stasiun pemancar radio/Televisi, pembangunan menara telekomunikasi dan atau sejenisnya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
    - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, telekomunikasi perdesaan, warung seluler, warung

- telekomunikasi atau sejenisnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerimaan retribusi/pendapatan daerah;
  - h. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - l. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan teknis dan pelaksanaan pengembangann Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengembangan sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
  - b. pelaksanaan Program kerja Seksi Pengembangann Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi skala kabupaten;
  - e. penyiapan *data base* untuk pembangunan dan pengembangan system Informasi / komunikasi skala kabupaten;
  - f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - i. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - j. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian

dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pengelolaan *E-goverment*, Persandian dan Statistik;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan di Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Manajemen data, Layanan dan Informasi *E-Government*;
  - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan pengembangan *E-Government*;
  - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan *E-Government*;
  - d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi pengembangan Infrastruktur aplikasi layanan pemerintahan, layanan publik dan tata laksana dalam bidang *E-Government*;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Seksi informasi dibidang *E-Government*;
  - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
  - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Persandian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, pengiriman, penerimaan dan penyampaian informasi dan pengamanan informasi di bidang persandian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Persandian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian;
  - c. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
  - d. Penyelenggaraan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi;
  - e. Pemeliharaan, penyimpan dan pengamanan dokumen dan alat-alat sandi;
  - f. Penyusunan rencana dan analisis kabupaten dan pengembangan peralatan sandi;
  - g. Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan personil / sandi;
  - h. Pelaksanaan inventarasi dan analisa permasalahan Persandian menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
  - j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
  - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - l. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
  - m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Seksi Statistik, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun serta memberikan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi data statistik yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah.  
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Statistik;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data/statistik pada bidang/sector tertentu sebagai bahan dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan rencana kebutuhan dan alat/media statistik;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan personil dalam penanganan data/statistik;
  - f. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi data/statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
  - g. Pelaksanaan pemeliharaan data base, pemutakhiran dan perbaikan data/statistik;
  - h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
  - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
  - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tertentu dan atau

dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana tugas operasional Dinas Komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksana urusan administrasi;
- c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Sintang

### a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2021)

| No            | Jenis Kelamin | Jumlah          |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1             | Laki – Laki   | 26 Orang        |
| 2             | Perempuan     | 11 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>37 Orang</b> |

**Tabel 2.2** Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No            | Tingkat Pendidikan | Jumlah          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 1             | Pasca Sarjana (S2) | 9 Orang         |
| 2             | Sarjana (S1)       | 17 Orang        |
| 3             | Diploma            | 2 Orang         |
| 4             | SLTA               | 9 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>37 Orang</b> |

**Tabel 2.3** Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

| No            | Golongan                  | Jumlah          |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1             | Pembina Tingkat I (IV/b)  | 2 orang         |
|               | Pembina (IV/a)            | 3 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>5 orang</b>  |
| 3             | Penata Tk I (III/d)       | 8 orang         |
|               | Penata (III/c)            | 7 orang         |
|               | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3 orang         |
|               | Penata Muda (III/a)       | 6 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>24 orang</b> |
| 4             | Pengatur Tk. I (II/d)     | 5 orang         |

|  |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
|  | Pengatur (II/c)            | 3 orang         |
|  | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 0 orang         |
|  | Pengatur Muda (II/a)       | 0 orang         |
|  | <b>Jumlah</b>              | <b>8 orang</b>  |
|  | <b>Jumlah Keseluruhan</b>  | <b>37 orang</b> |

#### b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Jumlah Sarana dan Prasarana (Per 2021)

| No | Jenis Barang                 | Jumlah | Keterangan                      |
|----|------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1  | Bangunan Gedung              | 1      | Eks Disperindagkop Kab. Sintang |
| 2  | Bangunan Aula                | 1      |                                 |
| 2  | Kendaraan Dinas              |        |                                 |
|    | - Kendaraan Roda 4 (Empat)   | 2      |                                 |
|    | - Kendaraan Roda 2 (Dua)     | 29     |                                 |
| 3  | Komputer (Personal Computer) |        |                                 |
| 4  | Laptop                       | 6      |                                 |
| 5  | Mesin Ketik Manual           | -      |                                 |
| 6  | AC                           | 8      |                                 |
| 7  | TV Berwarna                  | 1      |                                 |
| 8  | LCD                          | -      |                                 |
| 9  | Lemari Nikel                 | -      |                                 |
| 10 | Kamera Foto                  | -      |                                 |
| 11 | Lemari Arsip                 | -      |                                 |
| 12 | Wireless                     | -      |                                 |
| 13 | Brankas                      | 1      |                                 |
| 14 | Filling Cabinet              | 3      |                                 |
| 15 | Almari Kayu / Besi           | 1      |                                 |
| 16 | Meja kursi Tamu              | 2      |                                 |
| 17 | Meja Kerja                   | 14     |                                 |
| 18 | Kursi Kerja                  | 16     |                                 |
| 19 | Meja Rapat                   | 3      |                                 |
| 20 | Kursi rapat                  | -      |                                 |
| 21 | Jam dinding                  | -      |                                 |
| 22 | White board                  | -      |                                 |
| 23 | Kipas Angin                  | -      |                                 |
| 24 | Pesawat Telepon              | -      |                                 |
| 25 | Fax                          | -      |                                 |
| 26 | Printer                      | -      |                                 |

|    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| 27 | Layar LCD                  | 1 |  |
| 28 | Meja Komputer              | - |  |
| 29 | Alat Rumah tangga (gorden) | - |  |
| 30 | Kursi Kerja Lain –lain     | - |  |
| 31 | Tiang Bendera              | - |  |

### c. Anggaran

**Tabel 2.5** Anggaran Pelayanan (Belanja Langsung) Diskominfo

| Tahun | Jumlah Anggaran (Rp) |
|-------|----------------------|
| 2021  | 8.364.990.857        |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tidak lepas dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tiap tahunnya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut

**Tabel 2.6** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

| No  | Indikator Kinerja  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya (RPJMD, dll) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |            |            |             |             | Realisasi Capaian Tahun ke- |            |            |            |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |       |      |
|-----|--|-------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------------|------|------|-------|------|
|     |  |             |            |                                       | 2017                                      | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | 2017                        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| (1) | (2)  | (3)         | (4)        | (5)                                   | (6)                                       | (7)        | (8)        | (9)         | (10)        | (11)                        | (12)       | (13)       | (14)       | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19)  | (20) |
| 1   | Jumlah penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah*)  |             |            |                                       | -   | -          | 1 kegiatan | 1 kegiatan  | 1 kegiatan  |                             |            | 1 kegiatan | 1 kegiatan |      | -                            | -    | 100% | 100%  |      |
| 2   | Jumlah media luar publik, videotron yang dipelihara*)                                    |             |            |                                       | -   | -          | 2 vidtron  | 2 vidtron   | 3 vidtron   | -                           | -          | 2 vidtron  | 2 vidtron  |      | -                            | -    | 100% | 100%  |      |
| 3   | Jumlah laporan monitoring dan pembinaan aspirasi pembangunan                             |             |            |                                       | 1 laporan                                 | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan   | 1 laporan   | 1 laporan                   | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  |      | 100%                         | 100% | 100% | 100%  |      |
| 4   | Jumlah laporan penyebarluasan informasi dan program pembangunan melalui media luar ruang |             |            |                                       | 1 laporan                                 | 3 laporan  | 5 laporan  | 7 laporan   | 8 laporan   | 1 laporan                   | 1 laporan  | 4 laporan  | 5 laporan  |      | 100%                         | 33%  | 80%  | 71%   |      |
| 5   | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina                      |             |            |                                       | 1 kelompok                                | 3 kelompok | 5 kelompok | 10 kelompok | 20 kelompok | 1 kelompok                  | 3 kelompok | 6 kelompok | 8 kelompok |      | 100%                         | 100% | 120% | 80%   |      |
| 6   | Jumlah hotspot publik  |             |            |                                       | 1 station                                 | 4 station  | 6 station  | 8 station   | 10 station  | 1 station                   | 3 station  | 5 station  | 8 station  |      | 100%                         | 75%  | 83%  | 100%  |      |
| 7   | Persentase ketersediaan data dan informasi   |             |            |                                       | 100%                                      | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       |      | 100%                         | 100% | 100% | 100%  |      |
| 8   | Persentase Media Komunikasi dan konten   |             |            |                                       | 100%                                      | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       |      | 100%                         | 100% | 100% | 100%  |      |
| 9   | Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah                   |             |            |                                       | 100%                                      | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       |      | 100%                         | 100% | 100% | 100%  |      |
| 10  | Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain                                   |             |            |                                       | 10 OPD                                    | 20 OPD     | 30 OPD     | 40 OPD      | 40 OPD      | 10 OPD                      | 18 OPD     | 29 OPD     | 37 OPD     |      | 100%                         | 90%  | 96%  | 92,5% |      |



**Tabel 2.7** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                       | Anggaran Tahun |            |            |            |             | Realisasi Anggaran Tahun |            |            |            |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018       | 2019       | 2020       | 2021        | 2017                     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3          | 4          | 5          | 6           | 7                        | 8          | 9          | 10         | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| <b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>            |                |            |            |            |             |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Pemeliharaan jaringan telepon dan televisi                             | 82.246.096     | -          | -          | -          | -           | 80.927.925               | -          | -          | -          |      | 97%                                       | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |                            |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                      |                |            |            |            |             |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1.116.000      | 1.300.000  | 800.000    | 1.100.000  | 990.000     | 903.000                  | 1.055.000  | 780.000    | 1.098.000  |      | 80%                                       | 81%  | 97%  | 100% | 100% | -0,11                 | 0,09      | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 71.000.000     | 94.734.000 | 75.850.000 | 77.274.718 | 101.600.000 | 66.990.918               | 91.878.504 | 64.367.249 | 75.716.770 |      | 94%                                       | 96%  | 99%  | 98%  | 35%  | 0,43                  | -0,90     | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.800.000      | 3.500.000  | 4.500.000  | 1.000.000  | -           | 1.560.500                | 932.600    | 3.005.428  | 725.000    |      | 41%                                       | 26%  | 66%  | 73%  | -    | -2,80                 | -1        |                            |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | -              | -          | 8.276.000  | 1.571.900  | -           | -                        | -          | 8.078.000  | 1.571.900  |      | -   | -    | 97%  | 100% | -    | -4,26                 | -4        |                            |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 1.470.000      | 67.620.000 | 63.000.000 | 63.000.000 | -           | 1.470.000                | 67.620.000 | 62.982.000 | 63.000.000 |      | 100%                                      | 100% | 99%  | 100% | -    | 0,98                  | 1         |                            |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | -              | -          | -          | -          | 887.000     | -                        | -          | -          | -          |      | -   | -    | -    | -    | 100% | 0,00                  | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | -              | -          | -          | -          | 10.882.446  | -                        | -          | -          | -          |      | -   | -    | -    | -    | 72%  | 0,00                  | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                 | Anggaran Tahun |             |             |             |             | Realisasi Anggaran Tahun |             |             |             |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2017                     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                        | 8           | 9           | 10          | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Penyediaan alat tulis kantor                                     | 26.981.000     | 29.406.500  | 41.331.800  | 24.544.659  | -           | 26.981.000               | 29.405.700  | 41.306.300  | 24.535.000  |      | 100%                                      | 989% | 99%  | 100% | -    | -0,10                 | -0,1      |                            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | -              | -           | -           | -           | 107.820.500 | -                        | -           | -           | -           |      | -   | -    | -    | -    | 99%  | 0,00                  | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 3.416.640      | 70.560.000  | 11.387.500  | 3.300.000   | 1.250.000   | 3.250.637                | 70.560.000  | 11.325.000  | 3.300.000   |      | 95%                                       | 100% | 98%  | 100% | 100% | -1,73                 | -2        | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | -              | 4.080.000   | 4.200.000   | 74.711.500  | 7.000.000   | -                        | 4.050.000   | 4.200.000   | 74.711.500  |      | -   | 99%  | 200% | 100% | 100% | 0,42                  | 0,4       | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.480.000      | -           | 1.500.400   | -           | 407.000     | 6.401.000                | -           | 1.387.800   | -           |      | 98%                                       | -    | 92%  | -    | 100% | -14,9                 | -14,7     | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan makanan dan minuman                                   | 5.600.000      | 10.725.000  | 18.712.500  | 3.135.000   | -           | 5.600.000                | 10.725.000  | 17.800.000  | 3.135.000   |      | 100%                                      | 100% | 95%  | 100% | 100% | -0,79                 | -0,79     |                            |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | 166.580.000    | 88.010.000  | 184.720.000 | 108.855.000 | -           | 166.562.100              | 86.756.600  | 184.292.280 | 108.845.985 |      | 98%                                       | 98%  | 99%  | 100% | -    | -0,53                 | -0,53     |                            |
| Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah             | 13.210.000     | 30.800.000  | 52.275.000  | 63.895.000  | -           | 12.945.000               | 30.800.000  | 49.905.000  | 63.795.000  |      | 97%                                       | 100% | 95%  | 100% | -    | 0,79                  | 0,80      |                            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | -              | -           | -           | -           | 124.923.300 | -                        | -           | -           | -           |      | -   | -    | -    | -    | 100% | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran | 215.362.700    | 459.673.950 | 666.259.500 | 696.714.000 | 665.159.400 | 205.035.650              | 449.099.886 | 638.899.440 | 667.883.481 |      | 95%                                       | 97%  | 95%  | 96%  | 58%  | 0,68                  | 0,47      | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan tenaga kontrak  |                |             |             |             |             |                          |             |             |             |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                |             |             |             |             |                          |             |             |             |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)               | Anggaran Tahun |            |             |            |            | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |            |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020       | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3          | 4           | 5          | 6          | 7                        | 8          | 9           | 10         | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Peringatan Hari lang Tahun Republik Indonesia                  | -              | -          | 14.800.000  | 0          | -          | -                        | -          | 14.800.000  | 0          | -    | -   | -    | 100% | 0    | -    | 0                     | 0         |                            |
| Peringatan Hari Kebangkitan Nasional                           | -              | 21.640.000 | 25.000.000  | 0          | -          | -                        | 21.640.000 | 25.000.000  | 0          | -    | -   | 100% | 100% | 0    | -    | 0,13                  | 0,13      |                            |
| Pameran Pembangunan  | 25.250.000     | 20.000.000 | 42.672.900  | 0          | -          | 25.250.000               | 20.000.000 | 13.623.000  | 0          | -    | 100%                                      | 100% | 31%  | 0    | -    | 0,41                  | -0,85     |                            |
| Jasa tenaga pendukung dan operasional dan keamanan perkantoran | 110.228.400    | 16.359.800 | -           | -          | -          | 102.438.340              | 15.967.000 | -           | -          | -    | 92%                                       | 97%  | -    | -    | -    | -5,74                 | -5,42     |                            |
| Penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM) dan Gas                    | 11.760.000     | 13.560.000 | 6.000.000   | 5.000.000  | -          | 11.755.886               | 10.381.000 | 5.800.599   | 5.000.000  | -    | 99%                                       | 76%  | 96%  | 100% | -    | -1,35                 | -1,35     |                            |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                          | -              | -          | 211.690.000 | -          | -          | -                        | -          | 207.066.000 | -          | -    | -   | -    | 97%  | -    | -    | 0                     | 0         |                            |
| Penataan dokumen arsip   | -              | -          | -           | 3.768.000  | -          | -                        | -          | -           | 3.768.000  | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |                            |
| Penataan aset  | -              | -          | -           | 3.768.600  | -          | -                        | -          | -           | 3.768.600  | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |                            |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | -              | -          | -           | -          | 1.460.000  | -                        | -          | -           | -          | -    | -   | -    | -    | -    | 100% | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>                   |                |            |             |            |            |                          |            |             |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                | -              | -          | 75.900.000  | -          | 57.750.000 | -                        | -          | 75.600.000  | -          | -    | -   | -    | 99%  | -    | 100% | -0,31                 | -0,31     | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                    | -              | -          | -           | 56.980.000 | -          | -                        | -          | -           | 56.980.000 | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |                            |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>       |                |            |             |            |            |                          |            |             |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)  | Anggaran Tahun |            |             |      |            | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|---|----------------|------------|-------------|------|------------|--------------------------|------------|-------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|   | 2017           | 2018       | 2019        | 2020 | 2021       | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020 | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1   | 2              | 3          | 4           | 5    | 6          | 7                        | 8          | 9           | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Pengadaan peralatan gedung kantor   | 11.100.000     | -          | -           | -    | -          | 11.100.000               | -          | -           | -    | -    | 100%                                      | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |                            |
| Pengadaan mebeleur  | 117.500.000    | 75.500.000 | -           | -    | -          | 117.500.000              | 75.500.000 | -           | -    | -    | 100%                                      | 100% | -    | -    | -    | -0,56                 | -0,56     |                            |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  | 13.400.000     | 13.000.000 | 19.000.000  | -    | -          | 13.355.500               | 13.000.000 | 19.000.000  | -    | -    | 99%                                       | 100% | 100% | -    | -    | 0,29                  | 0,30      |                            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | -              | -          | -           | -    | 12.800.000 | -                        | -          | -           | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan     | -              | -          | -           | -    | 0          | -                        | -          | -           | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | -              | -          | -           | -    | 1.460.000  | -                        | -          | -           | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | -              | -          | -           | -    | 0          | -                        | -          | -           | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | -              | 6.000.000  | -           | -    | -          | -                        | 5.940.000  | -           | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |                            |
| Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer  | 70.800.000     | 16.800.000 | 121.000.000 | -    | -          | 69.800.000               | 16.800.000 | 120.360.000 | -    | -    | 98%                                       | 100% | 99%  | -    | -    | 0,41                  | 0,42      |                            |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                                      | Anggaran Tahun |            |             |           |      | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |           |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|---|----------------|------------|-------------|-----------|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|   | 2017           | 2018       | 2019        | 2020      | 2021 | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020      | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1   | 2              | 3          | 4           | 5         | 6    | 7                        | 8          | 9           | 10        | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | -              | 2.100.000  | -           | -         | -    | -                        | 2.100.000  | -           | -         | -    | -   | 100% | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                             |                |            |             |           |      |                          |            |             |           |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Pendidikan dan pelatihan formal   | -              | 72.835.000 | 144.510.000 | 9.477.248 | -    | -                        | 72.550.600 | 109.442.700 | 9.477.248 | -    | -   | 99%  | 75%  | 100% | -    | -6,69                 | -6,66     |     |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |                |            |             |           |      |                          |            |             |           |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD                        | -              | 1.843.750  | 3.357.900   | 1.911.000 | -    | -                        | 1.843.750  | 3.220.400   | 1.911.000 | -    | -   | 100% | 95%  | 100% | -    | 0,035                 | 0,035     |     |
| Penyusunan Anggaran, Laporan Semester, Prognosis dan Laporan Realisasi Keuangan       | -              | 1.706.250  | -           | -         | -    | -                        | 1.706.250  | -           | -         | -    | -   | 100% | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | -              | -          | -           | 3.468.000 | -    | -                        | -          | -           | 3.468.000 | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |     |
| Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)                  | -              | -          | -           | 3.465.000 | -    | -                        | -          | -           | 3.465.000 | -    | -   | -    | 100% | -    | -    | 0                     | 0         |     |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Uraian, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)  | Anggaran Tahun |            |           |           |      | Realisasi Anggaran Tahun |            |           |           |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|---|----------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|   | 2017           | 2018       | 2019      | 2020      | 2021 | 2017                     | 2018       | 2019      | 2020      | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1   | 2              | 3          | 4         | 5         | 6    | 7                        | 8          | 9         | 10        | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor   | -              | -          | -         | 3.500.000 | -    | -                        | -          | -         | 3.500.000 | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |     |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | -              | -          | 4.472.500 | 979.000   | -    | -                        | -          | 1.328.000 | 976.500   | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | -3,6                  | -0,4      |     |
| Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran perangkat daerah                                  | -              | -          | 4.973.000 | -         | -    | -                        | -          | 4.913.000 | -         | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>                |                |            |           |           |      |                          |            |           |           |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Pengumpulan data Pendukung Pembangunan Desa Broadband, Media Informasi Televisi dan BTS | 51.220.000     | -          | -         | -         | -    | 51.215.000               | -          | -         | -         | -    | 99%                                       | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat                                | -              | 76.675.000 | -         | -         | -    | -                        | 76.360.000 | -         | -         | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Monitoring dan Pembinaan Desa Broadband Terpadu   | 53.750.000     | 19.910.000 | -         | -         | -    | 48.360.000               | 8.995.000  | -         | -         | -    | 89%                                       | 45%  | -    | -    | -    | -1,70                 | -4,38     |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Menara Telekomunikasi ke Luar Daerah Kabupaten    | 31.410.000     | -          | -         | -         | -    | 30.827.000               | -          | -         | -         | -    | 98%                                       | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Penyebarluasan Informasi dan Program Pembangunan melalui Tatap Muka dan Media           | 55.906.000     | 25.845.500 | -         | -         | -    | 55.846.000               | 25.741.300 | -         | -         | -    | 99%                                       | 99%  | -    | -    | -    | -1,16                 | -1,17     |     |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun |             |      |      |      | Realisasi Anggaran Tahun |             |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|--|----------------|-------------|------|------|------|--------------------------|-------------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|  | 2017           | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1  | 2              | 3           | 4    | 5    | 6    | 7                        | 8           | 9    | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Luar Ruang   |                |             |      |      |      |                          |             |      |      |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan kehumasan dan informasi public luar daerah         | 34.665.000     | -           | -    | -    | -    | 34.651.000               | -           | -    | -    | -    | 99%                                       | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah        | 103.195.000    | 127.215.000 | -    | -    | -    | 108.749.000              | 126.869.000 | -    | -    | -    | 105%                                      | 99%  | -    | -    |      | 0,19                  | 0,14      |     |
| Pengadaan web SKPD Dinas Kominfo kominfo.sintang.go.id                                   | 35.200.000     | -           | -    | -    | -    | 32.200.000               | -           | -    | -    | -    | 91%                                       | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Aplikasi Informasi kabupaten                      | 104.065.000    | -           | -    | -    | -    | 103.579.800              | -           | -    | -    | -    | 99%                                       | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Keamanan Aplikasi Informatika Pemkab Sintang | 26.360.614     | -           | -    | -    | -    | 24.450.614               | -           | -    | -    | -    | 92%                                       | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi dan onsultasi Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik       | 176.732.000    | -           | -    | -    | -    | 175.108.000              | -           | -    | -    | -    | 99%                                       | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Sewa Colocation Server dan Pemeliharaan Security, Contengt, dan database                 | 46.000.000     | 38.140.000  | -    | -    | -    | 44.000.000               | 30.070.000  | -    | -    | -    | 95%                                       | 80%  | -    | -    |      | -0,21                 | -0,46     |     |
| Monitoring dan Pembinaan Pemanfaatan TIK Kecamatan                                       | 34.496.400     | -           | -    | -    | -    | 34.496.400               | -           | -    | -    | -    | 100%                                      | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         |     |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                                   | Anggaran Tahun |             |      |      |      | Realisasi Anggaran Tahun |             |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|--|----------------|-------------|------|------|------|--------------------------|-------------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|  | 2017           | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1  | 2              | 3           | 4    | 5    | 6    | 7                        | 8           | 9    | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Rencana Induk teknologi, Informasi dan Komunikasi                                  | 200.000.000    | -           | -    | -    | -    | 198.605.000              | -           | -    | -    | -    | 99%                                       | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan e-Government                               | -              | 122.455.000 | -    | -    | -    | -                        | 121.757.000 | -    | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Peningkatan Kompetensi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi                   | -              | 80.893.000  | -    | -    | -    | -                        | 78.951.000  | -    | -    | -    | -   | 97%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Portal Aplikasi Program Berbasis Android                                 | -              | 61.455.000  | -    | -    | -    | -                        | 60.520.000  | -    | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Komputer dan Perangkat Jaringan Komputer Ruang Server                    | -              | 119.249.600 | -    | -    | -    | -                        | 117.204.600 | -    | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Portal Aplikasi Sistem Informasi Publik                                  | -              | 103.808.100 | -    | -    | -    | -                        | 101.328.100 | -    | -    | -    | -   | 97%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pembangunan tenda Studio Portable  | -              | 38.605.000  | -    | -    | -    | -                        | 38.260.000  | -    | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah  | -              | 38.150.000  | -    | -    | -    | -                        | 37.564.900  | -    | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Peralatan pendukung peliputan  | -              | 146.835.000 | -    | -    | -    | -                        | 146.370.000 | -    | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Peliputan, Dokumentasi dan Visualisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah | -              | 196.590.000 | -    | -    | -    | -                        | 196.205.000 | -    | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |



Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Uraian, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun    |             |             |      |      | Realisasi Anggaran Tahun |             |             |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|--|-------------------|-------------|-------------|------|------|--------------------------|-------------|-------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|  | 2017              | 2018        | 2019        | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018        | 2019        | 2020 | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1  | 2                 | 3           | 4           | 5    | 6    | 7                        | 8           | 9           | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Pengadaan Perangkat Visual dan Multimedia  | -                 | 246.835.000 | -           | -    | -    | -                        | 243.555.000 | -           | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Peralatan jaringan computer dan server   | -                 | 203.175.000 | -           | -    | -    | -                        | 198.830.000 | -           | -    | -    | -   | 97%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Telematika   | -                 | 164.210.000 | -           | -    | -    | -                        | 163.736.200 | -           | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan Komputer Diskominfo  | -                 | 138.660.000 | -           | -    | -    | -                        | 138.148.000 | -           | -    | -    | -   | 99%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Koordinasi Pengembangan Lembaga Informasi Publik   | -                 | 95.570.000  | -           | -    | -    | -                        | 94.578.000  | -           | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| Pengkajian Sinergitas Pengembangan e-Government Daerah                                   | -                 | 69.381.100  | -           | -    | -    | -                        | 68.357.800  | -           | -    | -    | -   | 98%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| <b>PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>                |                   |             |             |      |      |                          |             |             |      |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Pelatihan Teknologi Informasi dan Komputer, Jaringan Komputer, Server dan web Programmer | -                 | 152.546.900 | -           | -    | -    | -                        | 143.729.000 | -           | -    | -    | -   | 94%  | -    | -    | -    | 0                     | 0         |     |
| <b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>                                       | <b>12.720.000</b> |             |             |      |      | <b>12.640.000</b>        |             |             |      |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |
| Pembinaan dan pengembangan jarring Komunikasi dan Informasi                              | -                 | -           | 172.600.000 | -    | -    | -                        | -           | 172.255.000 | -    | -    | -   | -    | 99%  | -    | -    | 0                     | 0         |     |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Uraian, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun |            |               |             |      | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |             |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
|  | 2017           | 2018       | 2019          | 2020        | 2021 | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020        | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |
| 1  | 2              | 3          | 4             | 5           | 6    | 7                        | 8          | 9           | 10          | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19  |
| Pengkajian dan pengembangan sistem informasi   | -              | -          | 503.470.000   | 62.799.000  | -    | -                        | -          | 462.196.300 | 62.799.000  |      |   |      |      | 100% |      | -7,02                 | -6,36     |     |
| Pengadaan dan Pengembangan Data Center dan Command Center pemerintah Daerah              | -              | -          | 2.006.933.100 | -           | -    | -                        | -          | 149.608.600 | -           |      | -   | -    | 7%   | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Pengendalian administrasi pelaporan pembangunan  |                |            |               | 0           | 0    |                          |            |             | 0           |      |   |      |      | 0%   |      | 0                     | 0         |     |
| Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Internet Publik (Hotspot Publik)                     | -              | 45.490.000 | -             | 100.032.000 | 0    | -                        | 42.500.000 | -           | 100.032.000 |      | -   | 93%  | -    | 100% |      | 0,55                  | 0,58      |     |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah                                   | -              | -          | 100.000.000   | 108.810.645 | 0    | -                        | -          | 91.543.000  | 108.105.645 |      | -   | -    | 91%  | 99%  |      | 0,08                  | 0,15      |     |
| Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)              | 12.720.000     | -          | 105.000.000   | 76.632.000  | 0    | 12.640.000               | -          | 100.641.600 | 76.526.000  |      | 99%                                       | -    | 95%  | 100% |      | 0,83                  | 0,83      |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | -              | -          | 129.240.000   | 9.235.000   | 0    | -                        | -          | 126.691.290 | 9.235.000   |      | -   | -    | 98%  | 100% |      | -                     | -         |     |
| Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan e-Government Pemerintah daerah | -              | -          | 51.535.000    | -           | -    | -                        | -          | 45.725.000  | -           |      | -   | -    | 88%  | -    |      | 0                     | 0         |     |
| Pemeliharaan rutin/berkala website sintang.go.id   | -              | -          | 37.449.900    | 35.534.000  | 0    | -                        | -          | 30.479.900  | 35.524.000  |      | -   | -    | 81%  | 100% |      | -0,05                 | 0,14      |     |
| Pemeliharaan rutin/berkala website   | -              | -          | 6.970.000     | -           | -    | -                        | -          | 6.970.000   | -           |      | -   | -    | 100% | -    |      | 0                     | 0         |     |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun |            |             |             |      | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |             |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket |    |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|----|
|  | 2017           | 2018       | 2019        | 2020        | 2021 | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020        | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |     |    |
|  | 1              | 2          | 3           | 4           | 5    | 6                        | 7          | 8           | 9           | 10   | 11  | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                    | 17        |     | 18 |
| diskominfo.sintang.go.id   |                |            |             |             |      |                          |            |             |             |      |   |      |      |      |      |                       |           |     |    |
| Penyelenggaraan e-Government Kecamatan se-Kabupaten Sintang                              | -              | 30.460.000 | 30.345.000  | 18.748.000  | -    | -                        | 30.070.000 | 25.655.000  | 18.748.000  |      | -   | 98%  | 84%  | 100% |      | -0,62                 | -0,60     |     |    |
| Pengelolaan dan pemeliharaan media luar publik, videotrone                               | -              | -          | 95.156.000  | 0           | -    | -                        | -          | 92.354.000  | 0           |      | -   | -    | 97%  | 0%   |      | 0                     | 0         |     |    |
| Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)                             | -              | -          | 39.030.000  | 0           | -    | -                        | -          | 37.535.000  | 0           |      | -   | -    | 96%  | 0%   |      | 0                     | 0         |     |    |
| Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi               | -              | -          | 40.000.000  | -           | -    | -                        | -          | 33.121.800  | -           |      | -   | -    | 82%  | -    |      | 0                     | 0         |     |    |
| Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi                                      | -              | -          | 35.710.000  | -           | -    | -                        | -          | 35.625.000  | -           |      | -   | -    | 99%  | -    |      | 0                     | 0         |     |    |
| Pengelolaan dan monitoring jaringan internet publik (hotspot publik)                     | -              | -          | 212.000.000 | 39.368.000  | 0    | -                        | -          | 210.598.800 | 39.325.000  |      | -   | -    | 99%  | 100% |      | -4,39                 | -4,36     |     |    |
| Penyediaan Informasi Publik terkait Covid-19   | -              | -          | -           | 255.750.000 | -    | -                        | -          | -           | 255.660.000 |      | -   | -    | -    | 100% |      | 0                     | 0         |     |    |
| Pengadaan Peralatan Mini Command Center untuk Pelayanan Publik dalam Penanganan Covid-19 | -              | -          | -           | 970.500.000 | 0    | -                        | -          | -           | 966.101.300 |      | -   | -    | -    | 100% |      | 0                     | 0         |     |    |
| Pembangunan Sarana Publikasi Kabupaten dalam Penanganan Covid-19                         | -              | -          | -           | 500.900.000 | -    | -                        | -          | -           | 440.279.000 |      | -   | -    | -    | 88%  |      | 0                     | 0         |     |    |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun |      |      |             |               | Realisasi Anggaran Tahun |      |      |             |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|------|------|-------------|---------------|--------------------------|------|------|-------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018 | 2019 | 2020        | 2021          | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020        | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3    | 4    | 5           | 6             | 7                        | 8    | 9    | 10          | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Pembuatan Video Sosialisasi New Normal   | -              | -    | -    | 165.884.000 | -             | -                        | -    | -    | 165.232.000 | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |                            |
| <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   |                |      |      |             |               |                          |      |      |             |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | -              | -    | -    | -           | 9.273.000     | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pelayanan Informasi Publik   | -              | -    | -    | -           | 41.718.000    | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Layanan Hubungan Media   | -              | -    | -    | -           | 2.152.610.000 | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | -              | -    | -    | -           | 43.282.836    | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | -              | -    | -    | -           | 30.000.000    | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | -              | -    | -    | -           | 27.755.000    | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | -              | -    | -    | -           | 17.914.700    | -                        | -    | -    | -           | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                     | Anggaran Tahun |            |             |            |             | Realisasi Anggaran Tahun |            |             |            |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018       | 2019        | 2020       | 2021        | 2017                     | 2018       | 2019        | 2020       | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3          | 4           | 5          | 6           | 7                        | 8          | 9           | 10         | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik           | -              | -          | -           | -          | 134.874.500 | -                        | -          | -           | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| <b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>                   |                |            |             |            |             |                          |            |             |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyebarluasan informasi pembangunan daerah                          | -              | -          | -           | 21.094.000 | -           | -                        | -          | -           | 21.094.000 | -    | -   | -    | -    | 100% | -    | 0                     | 0         |                            |
| Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah         | -              | -          | 356.371.500 | -          | -           | -                        | -          | 354.626.500 | -          | -    | -   | -    | 99%  | -    | -    | 0                     | 0         |                            |
| <b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |                |            |             |            |             |                          |            |             |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)  | -              | 43.720.000 | 51.735.000  | 30.900.000 | -           | -                        | 43.250.000 | 47.248.000  | 30.515.000 | -    | -   | 98%  | 91%  | 99%  | -    | -0,41                 | -0,42     |                            |
| Pengelolaan dan Pendataan Menara Telekomunikasi (BTS)                | -              | -          | 18.265.000  | 0          | -           | -                        | -          | 9.375.000   | 0          | -    | -   | -    | 51%  | 0%   | -    | 0                     | 0         |                            |
| <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                  |                |            |             |            |             |                          |            |             |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah              | -              | -          | -           | -          | 45.178.000  | -                        | -          | -           | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya                             | -              | -          | -           | -          | 16.700.000  | -                        | -          | -           | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun      |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Uraian, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)   | Anggaran Tahun |            |             |            |            | Realisasi Anggaran Tahun |            |            |            |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|--|----------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|  | 2017           | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       | 2017                     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1  | 2              | 3          | 4           | 5          | 6          | 7                        | 8          | 9          | 10         | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah   |                |            |             |            |            |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           | 2019                       |
| Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | -              | -          | -           | -          | 37.320.000 | -                        | -          | -          | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | -              | -          | -           | -          | 2.240.000  | -                        | -          | -          | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                 | -              | -          | -           | -          | 91.444.000 | -                        | -          | -          | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>  |                |            |             |            |            |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah   | -              | 99.998.100 | 100.000.000 | 24.950.000 | -          | -                        | 98.808.230 | 97.555.000 | 24.660.000 |      | 98%                                       | 97%  | 98%  | 99%  |      | -3,01                 | -3,01     |                            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>  |                |            |             |            |            |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | -              | -          | -           | -          | 9.887.000  | -                        | -          | -          | -          | -    | -   | -    | -    | -    | -    | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| <b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI</b>  |                |            |             |            |            |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)                          | Anggaran Tahun |            |            |            |           | Realisasi Anggaran Tahun |            |            |            |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           | Ket                        |
|---|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|   | 2017           | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2017                     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |                            |
| 1   | 2              | 3          | 4          | 5          | 6         | 7                        | 8          | 9          | 10         | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        | 19                         |
| <b>INFORMASI</b>  |                |            |            |            |           |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Monitoring dan Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan                     | 81.571.998     | 94.124.400 | 36.910.500 | 13.935.000 | -         | 81.356.998               | 94.094.400 | 36.235.000 | 13.935.000 |      | 99%                                       | 99%  | 98%  | 100% |      | -4,85                 | -4,84     |                            |
| Pengelolaan dan Pengembangan Persandian                                   | -              | -          | 63.090.000 | 30.613.000 | -         | -                        | -          | 58.950.400 | 30.608.000 |      | -   | -    | 93%  | 100% |      | -1,06                 | -0,93     |                            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>      |                |            |            |            |           |                          |            |            |            |      |   |      |      |      |      |                       |           |                            |
| Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    | -              | -          | -          | -          | 6.594.000 | -                        | -          | -          | -          |      | -   | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -              | -          | -          | -          | 7.151.000 | -                        | -          | -          | -          |      | -   | -    | -    | -    |      | 0                     | 0         | Permen dagri 90 Tahun 2019 |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### 2.4.1 Tantangan

1. Kurangnya Sumber daya manusia/aparatur yang memahami teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
3. Belum tertatanya jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sintang.
4. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan informasi dan komunikasi.
5. Banyaknya informasi tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas;
6. Banyaknya informasi yang berkembang melalui media massa yang mempengaruhi opini masyarakat;
7. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi;
8. Berkembangnya isu ramah lingkungan dan paperless office yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam terutama kertas dan hasil hutan lainnya secara lebih efisien dan hemat;

### 2.4.2 Peluang

- a) Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang yang tinggi dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
- b) Adanya dukungan institusi untuk penguatan potensi dan kompetensi aparatur pemerintahan;
- c) Pemanfaatan media massa baik surat kabar cetak maupun elektronik dan online untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.
- d) Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap informasi yang tidak sesuai.
- e) Semakin mudahnya pengaplikasian teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- f) Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dan semakin meningkatnya kemampuan berbagai instansi pemerintahan dalam penanganan tindak kejahatan cyber (cyber crime);
- g) Optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras untuk



mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menguras sumber daya alam;

- h) Semakin beragam dan semakin praktisnya piranti keras yang ada di pasar dalam mendukung peningkatan kinerja.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan tugas dan fungsi gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang yang akan dihadapi dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
3. Belum adanya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Standard Operation Procedure (SOP) di bidang komunikasi dan informatika.
4. Belum optimalnya pelaksanaan e-government di Kabupaten Sintang .
5. Belum terintegrasinya sistem informasi, aplikasi dan data di Kabupaten Sintang.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika.
7. Belum optimalnya jangkauan, penyebarluasan dan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
8. Belum optimalnya penyajian data statistik di Kabupaten Sintang.
9. Belum optimalnya pengelolaan persandian di Kabupaten Sintang.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.

4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

**Tabel 3.1** Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No  | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih   | Permasalahan Pelayanan OPD   | Sebagai Faktor                                  |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  | Penghambat                                      | Pendorong  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  |
| 1.  | Misi 6 :<br>Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Belum optimalnya penataan dan pengembangan manajemen pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Lemahnya koordinasi, masih kuatnya ego sektoral | Kebijakan pembangunan nasional dan daerah, peraturan terkait |
|     | a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa   | Belum optimalnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM   | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
|     | b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi  | Belum optimalnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM   | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
|     | c. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi   | Belum optimalnya Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi  | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM   | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
|     | d. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa  | Belum optimalnya Kerjasama Informasi dan Media Massa   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM   | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
|     | e. Program Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan  | Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan   | Kurangnya Sarana dan prasarana,                 | Kebijakan Pembangunan Nasional dan                           |

|  | Informatika   | Informatika   | kapasitas SDM                                 | daerah, Peraturan terkait                                    |
|--|---|---|---|--|
|  | f. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Belum optimalnya Pengembangan data/informasi/statistik daerah | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
|  | g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi              | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Kominfo Republik Indonesia

Visi dari Kemkominfo Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun beberapa misi yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 — 2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Terhadap sasaran Renstra Kemkominfo terdapat permasalahan dalam pelayanan yang digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2** Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Sasaran Jangka Menengah Kemkominfo RI  | Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang   | Sebagai Faktor                                |  |
|-----|--|---|---|--|
|     |  |   | Penghambat                                    | Pendorong  |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  |
| 1.  | Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan | Belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait |
| 2.  | Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan                             | Belum optimalnya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait |
| 3.  | Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman  | Belum optimalnya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait |
| 4.  | Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.  | Belum optimalnya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.                        | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan terkait |

### 3.3.2 Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat

Visi Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat 2014-2019 adalah : **“Terwujudnya Penyelenggaraan E-Government yang berkualitas, aman dan terkendali menuju Kalbar Go Digital”**

Sedangkan Misi Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk kelancaran arus informasi.
2. Mewujudkan implementasi penyelenggaraan E-Government dan SmartProvince melalui program, layanan publik dan proses kerja berbasis TIK.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan layanan publik dan media yang legal,

aman dan bermanfaat.

4. Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh.

**Tabel 3.3** Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kalbar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov. Kalbar                            | Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Sintang                                      | Sebagai Faktor                                |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | Penghambat                                    | Pendorong  |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
| 1.  | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik             | Belum optimalnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik               | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
| 2.  | Meningkatnya Akurasi Data Statistik  | Belum Akuratnya Data Statistik   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
| 3.  | Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan TIK, Penyelenggaraan E-Government dan E-Commerce | Belum optimalnya Kualitas Pemanfaatan TIK, Penyelenggaraan E-Government dan E-Commerce   | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
| 4.  | Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap Media                               | Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap Media                                 | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
| 5.  | Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap layanan publik                      | Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap layanan publik                        | Kurangnya sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, peraturan terkait |
| 6.  | Pengamanan informasi daerah yang lancar dan aman                                   | Belum optimalnya pengamanan informasi daerah yang lancar dan aman                        | Kurangnya sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |
| 7.  | Pengawasan dan Pembinaan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi             | Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan pengamanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Kurangnya Sarana dan prasarana, kapasitas SDM | Kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah, Peraturan terkait |

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

E–government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *e–government* semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak, termasuk Kabupaten Sintang. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat. Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan teknologi, menandai bergesernya peran pemerintah dalam dari pelaku menjadi fasilitator dan regulator. Oleh karena itu langkah penataan dan pengawasan menjadi bagian penting untuk dilakukan. Demikian pula dengan telekomunikasi, yang perkembangannya sangat cepat sehingga berdampak pada penyediaan infrastruktur pendukungnya. Berdirinya menara telekomunikasi BTS (*Base Transceiver Station*) dari penyedia jasa telekomunikasi akan menjadi permasalahan tersendiri bagi daerah apabila tidak

dilakukan penataan.

Diberlakukannya Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021 dan dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

**Tabel 4.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Satuan                       | Kondisi Awal      | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- |                   |                   |            |            |
|----|--|---|---|------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|
|    |  |   |   |                              | 2016              | 2017   | 2018              | 2019              | 2020       | 2021       |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                            | 6                 | 7  | 8                 | 9                 | 10         | 11         |
| 1  | Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas  | Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik                            | Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                | Predikat                     | Menuju Informatif | Menuju Informatif                              | Menuju Informatif | Menuju Informatif | Informatif | Informatif |
|    |  |   | Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk                       | %                            | 15%               | 20%  | 25%               | 30%               | 40%        | 50%        |
|    |  |   | Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi                                | %                            | 25%               | 30%  | 35%               | 40%               | 45%        | 50%        |
| 2  | Meningkatkan pengembangan Aplikasi Informatika yang Baik dan penerapan Pemerintahan daerah Berbasis Elektronik yang terintegrasi | Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi  | Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS | %                            | 30%               | 40%  | 50%               | 60%               | 65%        | 70%        |
|    |  |   | Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika                                       | Capaian Predikat Indeks SPBE | Predikat          | Kurang   | Kurang            | Cukup             | Cukup      | Cukup      |
|    |  | Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id                    |   | %                            | 40%               | 50%  | 60%               | 70%               | 75%        | 80%        |
| 3  | Meningkatkan keamanan informasi  | Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah | Indeks keamanan informasi   | Nilai                        | 215               | 220  | 240               | 260               | 280        | 300        |
|    |  |   | Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan                         | %                            | 30%               | 40%  | 50%               | 60%               | 70%        | 80%        |
| 4  | Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas  | Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya               | Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap         | %                            | 50%               | 55%  | 60%               | 70%               | 75%        | 80%        |

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|---|--|--------------------------|--------|--------------|--|------|------|------|------|
|    |   |  |                          |        |              | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  | 2   | 3  | 4                        | 5      | 6            | 7  | 8    | 9    | 10   | 11   |
|    |   |  | tahun                    |        |              |  |      |      |      |      |
| 5  | Melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah | Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah | Capaian Nilai SAKIP OPD  | Nilai  | C            | CC   | B    | BB   | BB   | A    |
|    |   |  | Capaian Nilai PMPRB OPD  | Nilai  | C            | CC   | B    | BB   | BB   | A    |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Diskominfo

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.1** Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| <b>Visi</b>   | : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021 |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Misi 6</b>   | : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih   |   |   |
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi  | Kebijakan   |
| <b>Tujuan 1</b><br>Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas  | <b>Sasaran 1.1</b><br>Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik  | <b>Strategi 1.1</b><br>1. Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi<br>2. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat<br>3. Peningkatan kerjasama dengan media massa | 1. Meningkatkan kinerja PPID utama dan PPID pembantu<br>2. Melakukan sosialisasi ke desa/kecamatan mengenai pembentukan KIM<br>3. Meningkatkan jumlah media komunikasi publik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam komunikasi publik |
| <b>Tujuan 2</b><br>Meningkatkan pengembangan Aplikasi Informatika yang Baik dan penerapan Pemerintahan daerah Berbasis Elektronik yang terintegrasi | <b>Sasaran 2.1</b><br>Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi  | <b>Strategi 2.1</b><br>Peningkatan Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS   | 1. Melakukan pendataan desa yang belum terhubung dengan internet<br>2. Koordinasi bersama BAKTI Kemenkominfo terkait dengan pembangunan BTS di desa-desa  |
|   | <b>Sasaran 2.2</b><br>Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika   | <b>Strategi 2.2</b><br>1. Peningkatan Nilai Indeks SPBE<br>2. Pengoptimalan OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id   | 1. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government<br>2. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur<br>3. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Tujuan 3</b><br/>Meningkatkan keamanan informasi</p>   | <p><b>Sasaran 3.1</b><br/>Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah</p> | <p><b>Strategi 3.1</b><br/>1. Peningkatan nilai Indeks keamanan informasi<br/>2. Peningkatan Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan</p>   | <p>Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian</p>  |
| <p><b>Tujuan 4</b><br/>Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas</p> | <p><b>Sasaran 4.1</b><br/>Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrtasi setiap tahunnya</p>              | <p><b>Strategi 4.1</b><br/>Pengoptimalan penyusunan dokumen statistik sektoral</p>  | <p>1. Meningkatkan SDM Pengeloal Satatistik Sektoral Daerah<br/>2. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam pengelolaan statistik sektoral</p>             |
| <p><b>Tujuan 5</b><br/>Melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah</p>                       | <p><b>Sasaran 5.1</b><br/>Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah</p>                                    | <p><b>Strategi 5.1</b><br/>Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemkab Sintang untuk pencapaian kinerja dan reformasi birokrasi</p> | <p>Mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peningkatan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja</p> |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1** Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

| Tujuan  | Sasaran  | Indikator sasaran      | Kode | Program dan kegiatan   | Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)                               | Data capaian pada tahun awal perencanaan   | Target kinerja program dan kerangka pendanaan |            |        |            |             |            |             |            |               |             | Unit kerja SKPD penanggung-jawab | Lokasi      |            |               |            |             |             |             |         |
|---|--|------------------------|------|--|---|--|---|------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|   |  |                        |      |  |   |  | 2017  |            | 2018   |            | 2019        |            | 2020        |            | 2021          |             |                                  |             |            |               |            |             |             |             |         |
|   |  |                        |      |  |   |  | Target  | Rp.        | Target | Rp.        | Target      | Rp.        | Target      | Rp.        | Target        | Rp.         |                                  |             |            |               |            |             |             |             |         |
| 1   | 2  | 3                      | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9          | 10     | 11         | 12          | 13         | 14          | 15         | 16            | 17          | 18                               | 19          |            |               |            |             |             |             |         |
| Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |                        |      | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b> |   |  |   |            |        |            |             |            |             |            |               |             |                                  | Bidang PIKP | Sintang    |               |            |             |             |             |         |
|   |  |                        |      | 1  | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi                            | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi                  |   |            |        |            |             |            |             |            | 1.500.000.000 |             |                                  |             |            |               | -          | Bidang PIKP | Sintang     |             |         |
|   |  |                        |      | 2  | Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi  | Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi   |   |            |        |            |             |            |             |            |               | 500.000.000 |                                  |             |            |               |            | -           | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 3  | Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah                                  | Jumlah Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah  |   |            |        |            | 100.000.000 |            | 120.000.000 |            |               | 144.000.000 |                                  | 172.800.000 |            | 207.360.000   |            |             | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 4  | Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah    |   |            |        |            | 100.000.000 |            | 110.000.000 |            |               | 121.000.000 |                                  | 133.100.000 |            | 146.410.000   |            |             | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 5  | Pengelolaan dan pemeliharaan media luar Public, videotrone                              | Jumlah media luar Public, videotrone yang dipelihara                                       |   |            |        |            | 50.000.000  |            | 60.000.000  |            |               | 72.000.000  |                                  | 86.400.000  |            | 95.040.000    |            |             | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 6  | Pengadaan Konstruksi Tenda Media Luar Ruang   | Jumlah Tenda Media Luar Ruang  |   |            |        |            |             |            | 50.000.000  |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 7  | Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat                                | Laporan Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat                           |   |            |        |            |             |            | 60.000.000  |            |               |             | 69.000.000                       |             | 79.350.000 |               | 91.252.500 |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 8  | Penyebarluasan informasi dan Program Pembangunan Melalui Media Luar Ruang               | Laporan Penyebarluasan informasi dan Program Pembangunan Melalui Media Luar Ruang          |   |            |        |            |             |            | 40.000.000  |            |               |             | 48.000.000                       |             | 57.600.000 |               | 69.120.000 |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 9  | Pembentukan Desa Boardband Terpadu  | Jumlah Desa Boardband Terpadu yang dibentuk  |   |            |        |            | 100.000.000 |            | 200.000.000 |            |               | 400.000.000 |                                  | 800.000.000 |            | 1.600.000.000 |            |             | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 10   | Monitoring dan Pembinaan Desa Boardband Terpadu   | Laporan Monitoring dan Pembinaan Desa Boardband Terpadu                                    |   |            |        |            | 50.000.000  |            | 70.000.000  |            |               | 98.000.000  |                                  | 137.200.000 |            | 192.080.000   |            |             | Bidang PIKP | Sintang     |         |
|   |  |                        |      | 11   | Pengadaan Komputer dan Perangkat Jaringan Komputer Ruang Server                         | Jumlah Komputer dan Perangkat Jaringan Komputer Ruang Server                               |   |            |        |            |             |            | 200.000.000 |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 12   | Pengadaan peralatan pendukung peliputan   | Jumlah peralatan pendukung peliputan   |   |            |        |            |             |            | 150.000.000 |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 13   | Peliputan, dokumentasi dan visualisasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah      | Laporan Peliputan, dokumentasi dan visualisasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah |   |            |        |            |             |            | 200.000.000 |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 14   | Koordinasi pengembangan lembaga informasi publik  | Laporan Koordinasi pengembangan lembaga informasi publik                                   |   |            |        |            |             |            | 100.000.000 |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 15   | Pengadaan portal aplikasi informasi program berbasis android                            | Portal aplikasi informasi program berbasis android   |   |            |        |            |             |            | 75.000.000  |            |               |             |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 16   | Pembuatan Video Profil Kabupaten Sintang  | Video Profil Kabupaten Sintang   |   |            |        |            |             |            | 65.000.000  |            |               |             |                                  | 65.000.000  |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 17   | Pembangunan Televisi Publik (Digital)   | Televisi Publik (Digital)  |   |            |        |            |             |            |             |            |               | 500.000.000 |                                  |             |            |               |            |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
|   |  |                        |      | 18   | Penerbitan Buletin Kominfo  | Jumlah Buletin Kominfo   |   |            |        |            |             | 15.000.000 |             | 16.500.000 |               |             | 18.150.000                       |             | 19.965.000 |               | 21.961.500 |             |             | Bidang PIKP | Sintang |
| 19  | Pekan Informasi Daerah   | Pekan Informasi Daerah |      |  |   |  |   | 75.000.000 |        | 82.500.000 |             |            | 90.750.000  |            | 99.825.000    |             | 109.807.500                      |             |            | Bidang PIKP   | Sintang    |             |             |             |         |

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator sasaran | Kode | Program dan kegiatan   | Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)                     | Data capaian pada tahun awal perencanaan   | Target kinerja program dan kerangka pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Unit kerja SKPD penang-gung-jawab | Lokasi  |  |
|--|---|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|---------|--|
|  |   |                   |      |  |   |  | 2017  |             | 2018   |             | 2019   |             | 2020   |             | 2021   |             |                                   |         |  |
|  |   |                   |      |  |   |  | Target  | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         |                                   |         |  |
| 1  | 2   | 3                 | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14     | 15          | 16     | 17          | 18                                | 19      |  |
|  |   |                   |      | 20   | Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)           | Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                    |   | 20.000.000  |        | 22.000.000  |        | 24.200.000  |        | 26.620.000  |        | 29.282.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 21   | Monitoring dan Evaluasi Terhadap Media di Kabupaten Sintang                   | Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Media di Kabupaten Sintang                    |   | 50.000.000  |        | 60.000.000  |        | 72.000.000  |        | 86.400.000  |        | 103.680.000 | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 22   | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi  | Jumlah Alat Studio dan Komunikasi  |   | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | <b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b> |   |  |   |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
| Meningkatkan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Terwujudnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi |                   |      | 1  | Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika | Buku Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika     |   | 75.000.000  |        | 80.000.000  |        | 85.000.000  |        | 90.000.000  |        | 95.000.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | <b>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</b>                        |   |  |   |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 1  | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                  | Laporan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                   |   | 90.000.000  |        | 108.000.000 |        | 129.600.000 |        | 155.520.000 |        | 186.624.000 | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 2  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                   | Laporan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                    |   | 25.000.000  |        | 25.000.000  |        | 25.000.000  |        | 25.000.000  |        | 25.000.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 3  | Sosialisasi dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi       | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |   | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 36.000.000  |        | 39.600.000  |        | 43.560.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 4  | Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                  | Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                           |   | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 36.000.000  |        | 39.600.000  |        | 43.560.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | 5  | Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)   | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina                    |   | 30.000.000  |        | 36.000.000  |        | 43.200.000  |        | 51.840.000  |        | 62.208.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |
|  |   |                   |      | <b>Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah</b>                       |   |  |   |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                   |         |  |
| Meningkatkan Peringatan Hari Nasional Dan Daerah                       | Terwujudnya Peringatan Hari Nasional Dan Daerah                       |                   |      | 1  | Peringatan Hari Kebangkitan Nasional  | Laporan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional   |   | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  | Bidang PIKP                       | Sintang |  |

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang. Target indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator   | Data Capaian Tahun awal Perencanaan | Target Capaian Setiap Tahun |                   |                   |            |            | Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---|
|    |   | Tahun 2016                          | 2017                        | 2018              | 2019              | 2020       | 2021       |   |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                           | 5                 | 6                 | 7          | 8          | 9                                       |
| 1. | Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                | Menuju Informatif                   | Menuju Informatif           | Menuju Informatif | Menuju Informatif | Informatif | Informatif | Informatif                              |
| 2. | Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk                       | 15%                                 | 20%                         | 25%               | 30%               | 40%        | 50%        | 50%                                     |
| 3. | Persentase media komunikasi publik yang terintegrasi                                | 25%                                 | 30%                         | 35%               | 40%               | 45%        | 50%        | 50%                                     |
| 4. | Persentase Desa yang terhubung dengan akses internet melalui Tower Provider dan BTS | 30%                                 | 40%                         | 50%               | 60%               | 65%        | 70%        | 70%                                     |
| 5. | Capaian Predikat Indeks SPBE  | Kurang                              | Kurang                      | Cukup             | Cukup             | Cukup      | Cukup      | Cukup                                   |
| 6. | Persentase OPD yang memiliki website dengan domain sintang.go.id                    | 40%                                 | 50%                         | 60%               | 70%               | 75%        | 80%        | 80%                                     |
| 7. | Indeks keamanan informasi   | 215                                 | 220                         | 240               | 260               | 280        | 300        | 300                                     |



| No  | Indikator   | Data Capaian Tahun awal Perencanaan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---|
|     |   | Tahun 2016                          | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |   |
| 1   | 2   | 3                                   | 4                           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                                       |
| 8.  | Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan                       | 30%                                 | 40%                         | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | 80%                                     |
| 9.  | Persentase dokumen statistik sektoral yang tersusun dan terintegrasi setiap tahun | 50%                                 | 55%                         | 60%  | 70%  | 75%  | 80%  | 80%                                     |
| 10. | Capaian Nilai SAKIP OPD   | C                                   | CC                          | B    | BB   | BB   | A    | A                                       |
| 11. | Capaian Nilai PMPRB OPD   | C                                   | CC                          | B    | BB   | BB   | A    | A                                       |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang berisikan penjabaran visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun ke depan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang memperhatikan situasi, kondisi dan potensi kawasan perbatasan Kabupaten Sintang, serta memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan profesional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berupaya mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika secara HANDAL.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diharapkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sintang setiap akhir tahun anggaran.